

BHAGAVADGĪTĀ: KEBEBASAN, MORAL, KEBAHAGIAAN

# BASIS



**Tianxia** :  
Filsafat China  
tentang  
Tata Pemerintahan  
Dunia

---

**Seabad**  
Sartono Kartodirdjo  
(1921-2021):  
Bacaan dan  
Santapan

---

**Vaksin Covid dan**  
Kultus Individu

---



SISYPHUS #2, 2018  
karya BUDI SANTOSO

Rp 25.000.00

DUA BULANAN, NOMOR.01 - 02, TAHUN KE-70, 2021

# BASIS

menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.  
 Jo Ditjen PPG  
 Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996  
 Penerbit  
 Yayasan BP Basis  
 Anggota SPS ISSN: 0005-6138  
 Pehashahat  
 Franz Magnis-Suseno  
 P Swantoro  
 Pemimpin Umum  
 Sindhunata  
 Pemimpin Redaksi  
**A. Setyo Wibowo**  
 Wakil Pemimpin Redaksi  
**A. Sudiarja**  
 Redaktur Pelaksana  
**A. Bagus Laksana**  
 Wakil Redaktur Pelaksana  
**Purnawijayanti**  
 Redaksi  
**B. Hari Jullawan**  
 Heru Prakosa  
**B. Rahmanto**  
**C. Bayu Risanto**  
 Redaktur Artistik  
**Hari Budiono**  
 Purnawijayanti  
 Promosi/ Iklan  
**Slamet Riyadi, A. Yulianto**  
**Willy Putranta**  
 Administrasi/ Distribusi  
**Anang Pramuriyanto**  
**Maria Dwiwijayanti**  
 Keuangan  
**Francisca Triharyanti, Ani Ratna Sari**

Alamat  
 Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta  
 Telepon: 081225225423, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:  
 basis.adisi@gmail.com  
 Surel redaksi: majalahbasis@gmail.com

Rekening:  
 BCA Sudirman Yogyakarta No. 0370285110  
 a.n. Sindhunata, BRI Cik Ditiro Yogyakarta No. 0029-  
 01-000113-56-8 a.n. Sindhunata  
 BNI Cab. Yogyakarta No. 1952000512  
 a.n. Bpk Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN / A. Setyo Wibowo  
 Vaksin Covid-19 dan Kultus Individu ... 2

KACABENGGALA / A. Bagus Laksana  
 Melankolia dan Pengharapan ... 4

ETIKA / A. Sudiarja  
 Kebebasan, Moral, dan  
 Kebahagiaan ... 10

SOSIAL / J. Sudrianta  
 Kontemplasi Batin ... 18

SOSOK / A. Meissi Santosa  
 BKS Iyengar: Yoga Modern ... 28

POLITIK / Klaus Heinrich Radtito  
 Tianxia: Filsafat Cina  
 Tentang Tata Pemerintahan Dunia ... 33

SENI / Mudji Sutrisno  
 Menikmati (Karya) Seni ... 40

SOSOK / Bandung Mawardi  
 Sartono Kartodirdjo (1921-2021):  
 Bacaan dan Santapan ... 45

SEJARAH / Iwan Setiawan  
 Taman yang Subur ... 49

PENDIDIKAN / M. Fauzi Sukri  
 Si Cilik Ruci:  
 Perihal Pendidikan-Pengajaran ... 52

SEJARAH / Muhammad Rizky Wiryawan  
 Malam dan Mojang Bandung:  
 Zaman Kolonial ... 55

SOSIAL / Susantini  
 Yang Dipelajari, Yang Dialami ... 59

BUKU / Albertus Erwin Susanto  
 Penyelesaian Kasus 1965:  
 Tak Mau dan Tak Mampu ... 61

SOSIAL / Ais Nurbiyah Al-Jum'ah  
 Makanan:  
 Tempat dan Rasa ... 65

70 TAHUN MAJALAH BASIS / Bandung Mawardi  
 Berhalaman Puisi ... 67



**Santana Prima Tour**  
 your travelling partner

Jl. Diponegoro 116, Yogyakarta  
 Email: tour.santana@yahoo.com

(0274) 513873  
 WA: 0877 3964 2832

**SANTANA MONIKAYA**  
**MONEY CHANGER**

Jl. Diponegoro 116, Yogyakarta 55233

☎ 0274 - 513 873  
 ☎ 0878 3428 9151

**Reservasi:** • e-tiket pesawat dalam dan luar negeri • e-tiket kereta api • e-voucher hotel dalam dan luar negeri  
 • Paket tour dalam dan luar negeri • Pembuatan kartu identitas pelajar internasional/ ISIC • MICE  
 • Pengurusan paspor, visa dan asuransi perjalanan • Medical evacuation & charter flight • Money changer

# Penyelesaian Kasus 1965: Tak Mau dan Tak Mampu

Bagi kebanyakan orang, “Peristiwa 1965” adalah kejadian biasa, sekadar sebuah titik sejarah, bila tidak dikatakan asing. Namun, bagi yang mengerti persoalannya, “Peristiwa 1965” adalah beban berat Bangsa Indonesia yang tampak mustahil diselesaikan

ALBERTUS ERWIN SUSANTO

*1965 Pada Masa kini: Hidup dengan Warisan Pembantaian Massal*, editor: Martin Eickhoff, Gerry van Klinken, Geoffrey Robinson, Sanata Dharma University Press dan Pusedema, Yogyakarta, 2019, halaman: x + 291

“Tidak mau dan tidak mampu” merupakan dua predikat yang diberikan oleh Aboeprijadi Santoso dan Gerry van Klinken kepada pemerintah Indonesia, terkait sikap pemerintah dalam usaha penyelesaian kasus 1965. Hal itu dituliskan dalam “Genosida akhirnya Memasuki Wacana Publik: Pengadilan Rakyat Internasional 1965”, satu dari 10 karangan dalam buku *1965 Pada Masa Kini – Hidup dengan Warisan Peristiwa Pembantaian Massal*. Buku ini terjemahan dari *Journal of Genocide Research*, Volume 19, Nomor 4, 2017. Isinya tulisan-tulisan terpilih pada konferensi internasional di Amsterdam pada 1-2 Oktober 2015. Edisi Bahasa Indonesia ini disertai pengantar dari Baskara T. Wardaya yang mengajak pembaca untuk “kembali belajar bersama tentang 1965” (hlm. iii) dan gagasan tindak lanjut dari Antonius Sumarwan yang mengajak semua komponen bangsa bergerak.

Ketegasan posisi dan detail data buku ini menawarkan kejelasan akan apa yang sesungguhnya terjadi terkait “Peristiwa 1965”, sejarah panjang perjuangan pengungkapan kebenaran yang banyak diabaikan, rele-

vansi penyelesaian kasus 55 tahun lalu itu untuk saat ini, serta petunjuk akan apa yang perlu dikerjakan bersama. **Siapa yang bersalah, siapa korban?**

Tidak semua generasi muda Indonesia memiliki pengetahuan tentang “Peristiwa 1965”. Sedangkan generasi tuanya, pada umumnya memiliki dua penafsiran yang saling bersaing. Martijn Eickhoffa, Gerry van Klinkenb, dan Geoffrey Robinson dalam pengantar menyebutnya sebagai “interpretasi horisontal” dan “interpretasi vertikal”.

Yang pertama mengatakan bahwa pada tahun 1965 PKI telah berulah melakukan kudeta dan membunuh para jenderal. Akibatnya, masyarakat marah dan spontan bergerak membalas dengan menghabisi PKI sampai ke akar-akarnya. Sementara itu, interpretasi vertikal menjelaskan bahwa narasi pertama tersebut sekadar karangan; yang sebenarnya terjadi adalah pemerintahlah – atau lebih tepat Angkatan Darat – yang berinisiatif menghabisi PKI, bahkan memaksa masyarakat untuk ikut serta membantai anggota PKI, simpatisannya, serta semua saja yang dituduh punya kaitan dengan kelompok tersebut. Sekitar setengah juta orang dibunuh dan ratusan ribu lainnya ditangkap serta dipenjarakan. Semuanya itu tanpa proses peradilan.

Kontestasi narasi ini masih terjadi hingga hari ini dan kejelasan akan narasi mana yang benar sulit ditunjukkan kepada masyarakat karena setiap upaya untuk memahaminya secara ilmiah atas dasar bukti-bukti yang gamblang sering kali ditekan dan dibubarkan. Bahkan masyarakat pun ditakut-takuti bahwa upaya pembuktian kebenaran merupakan tanda-tanda kebangkitan komunisme, yang ateis dan biadab, yang dapat membahayakan bangsa. Kelompok orang yang menolak pengungkapan kebenaran ini bisa jadi memang sejujurnya takut, bukan karena ingin menghindari kebenaran, tapi karena telah begitu yakin akan kebenaran penafsiran pertama.

Di hadapan ketidakjelasan itu, langsung pada karangan pertama berjudul "Sampai ke Akar-akarnya: Peran Angkatan Darat Indonesia dalam Pembantaian Massal tahun 1965-66", Geoffrey Robinson memberikan sorotan tajam tentang siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab: TNI Angkatan Darat. Dalam ketegasan posisinya, ia bahkan mengkritik para peneliti "kekerasan massal anti-komunis tahun 1965" yang sibuk berbicara tentang dinamika sosio-psikologis masyarakat, perselisihan budaya dan agama, konflik sosio-ekonomi, serta persoalan campur tangan internasional. Baginya, semua pembicaraan itu, kendati benar dan menunjukkan kompleksitas konteks persoalannya, hanya menyebabkan teralihkannya perhatian dari apa yang paling penting: proses politik dan tindakan bebas manusia. Ia menegaskan,

"Argumen saya adalah apa pun yang mendasari konflik agama, budaya dan sosioekonomi pada konflik Oktober 1965, betapun masyarakat Indonesia bersedia untuk bergabung dalam peperangan tersebut, dan betapa pun lingkungan internasional melakukan pembiaran pada saat itu – pembunuhan massal dan penahanan tidaklah terelakkan atau spontan, melainkan *didorong, difasilitasi, diarahkan dan dibentuk* oleh pimpinan Angkatan Darat" (hlm. 30).

Narasi Robinson sangat kuat. Ia menggambarkan proses komando yang terjadi, bahkan cara propaganda yang dipakai untuk membius nurani, memoles agar pembunuhan menjadi dharma bagi negara dan agama, dan membangkitkan kegentingan yang dibuat-buat seakan hanya ada dua pilihan: dibunuh atau membunuh. Hal serupa disampaikan oleh Jess Melvin dalam tulisan berjudul "Mekanika Penjajagan Massal". Atas dasar arsip milik Badan Intelijen Negara di Banda Aceh, Melvin

membuktikan bagaimana "jajaran pimpinan militer memprakarsai dan melaksanakan penjajagan sebagai bagian dari operasi militer yang terkoordinasi" (hlm. 63). Singkatnya, mereka berdua menunjukkan bagaimana Peristiwa 1965 – dibunuhnya setengah juta jiwa – menuntut tanggung jawab dari perancang dan pelaku utamanya, juga semua kroni yang mendukungnya.

#### Kembali ke titik awal?

Sejak runtuhnya Orde Baru, tidaklah sedikit upaya untuk membongkar kebenaran dan menyingkirkan kebohongan yang sudah lama dipopulerkan rezim ini. Aboeprijadi Santoso dan Gerry van Klinken dalam "Genosida Akhirnya Memasuki Wacana Publik" menjelaskan beragam upaya masyarakat dan tanggapan pemerintah yang ditandai gerak maju-mundur.

Dari pihak pemerintah, langkah paling awal dan amat berani dibuat oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang pada 1999 dan 2000 menyampaikan permintaan maaf, kendati berakhir sekadar ungkapan semata. Selanjutnya 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilaporkan telah menulis naskah permintaan maaf kepada para korban yang sedianya akan dibacakan pada Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2012. Namun permintaan maaf ini batal disampaikan. Tahun itu juga Komnas HAM telah membuat laporan lengkap tentang kejahatan 1965, tetapi hasilnya ditolak oleh Kejaksaan Agung tanpa niat memverifikasi bukti-bukti laporan tersebut. Presiden Joko Widodo, berjanji sebelum Pemilihan Umum 2014 untuk menyelesaikan kasus 1965 dan pelanggaran HAM masa lalu, namun hingga kini pun tidak ada kebijakan yang konkret menjalankan niat tersebut.

Dari pihak masyarakat, banyak yang sudah dibuat. Pada November 2000, beberapa kelompok mengadakan penggalian kuburan massal dan menjadikannya film dokumenter yang disebarluaskan secara daring. Syarikat Yogyakarta yang beranggotakan para pengikut Islam progresif Abdurrahman Wahid, sejak awal 2000 juga mengadakan pertemuan dengan para korban di Jawa Timur dan Tengah untuk mengupayakan rekonsiliasi. Pada tahun 2013, diselenggarakan serangkaian pertemuan untuk mendengarkan kesaksian para penyintas. Acara tersebut diadakan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran.

Semua upaya yang ada sejauh ini berpuncak pada Pengadilan Rakyat Internasional 1965 (PRI) yang diadakan di Den Haag, pada 10-13 November 2015. Acara tersebut diprakarsai oleh para eksil Indonesia, aktivis,

dan para peneliti internasional. Pengadilan ini memang tidak punya daya ikat apapun terhadap Indonesia sebagai negara berdaulat, tetapi melaluinya telah diperiksa beragam kesaksian dan bukti hingga diputuskan bahwa pemerintah Indonesia memang bertanggung jawab atas Peristiwa 1965. Pengadilan ini memicu perhatian internasional dan mendesak pemerintah, akan tetapi pemerintah lagi-lagi menganggapnya omong kosong belaka.

Ada sedemikian banyak upaya dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Akan tetapi, proses penyelesaian kasus 1965 menapaki jalan buntu, atau harus kembali ke titik awal dan sia-sia.

#### Masih relevan?

Beberapa orang mungkin menyangsikan relevansi penyelesaian kasus 1965. Dalam seminar anti-PKI yang diadakan pada Juni 2016, upaya penyelesaian dianggap sebagai usaha mengorek-ngorek luka lama "yang dapat menimbulkan pertumpahan darah baru". Seminar tersebut diadakan untuk menanggapi PRI dan simposium

“

**Buku ini menunjukkan dua relevansi paling krusial bagi bangsa Indonesia, yaitu bahwa kebenaran Peristiwa 1965 memang mesti dibongkar dan pihak yang bertanggung jawab mesti diadili.**

”

April 2016 yang telah berhasil mempertemukan banyak pihak untuk membicarakan Tragedi '65. Melaluinya narasi horisontal dipromosikan lagi dan, parahnya, usaha penyelesaian dicap sebagai kebangkitan PKI yang berbahaya.

Jadi masih relevankah Peristiwa 1965? Buku ini secara khusus menunjukkan relevansi pengungkapan kebenaran Peristiwa '1965 dalam konteks studi genosida global. Hal ini terutama ditekankan oleh Ugur Ümit Ügür dan Nanci Andler dalam Epilog. Tetapi di luar hal itu, buku ini menunjukkan dua relevansi paling krusial bagi

bangsa Indonesia, yaitu bahwa kebenaran Peristiwa 1965 memang mesti dibongkar dan pihak yang bertanggung jawab mesti diadili.

*Pertama*, karangan-karangan dalam buku ini menunjukkan betapa besarnya penderitaan yang terjadi, betapa biadabnya pilihan para pelaku, bahkan kesengsaraan itu masih terus dibawa para korban hingga hari ini. Kata kesengsaraan mungkin tidak berbunyi, maka memang perlu diganti dengan kata-kata yang konkret: leher yang digorok, orang yang ditarik paksa malam-malam, kemaluan yang dipotong, mata yang dicolok, kerja paksa, penahanan, dan pengasingan; juga pemerkosaan dan kekerasan seksual lain, yang oleh Annie Pohlman dibahas secara panjang lebar dan dinilai sebagai kejahatan terhadap umat manusia. Tanpa mengakui hal ini dan menegakkan keadilan, bangsa ini kehilangan integritasnya dan membiarkan kebiadaban terus ada.

*Kedua*, pembunuhan sekitar setengah juta jiwa itu terjadi dengan jalan penciptaan gambaran barbar dan tidak bermoral atas PKI (dan semua yang diduga bagian darinya). Surat kabar *Angkatan Bersenjata* pada 14 Oktober bahkan memberikan justifikasi spiritual dengan berkata, "Tuhan bersama kita karena kita berada di jalan yang benar dan bahwa Dia telah menyiapkannya bagi kita" (hlm. 48). Melihat bagaimana propaganda itu dirancang dengan menggunakan bahan konflik kultural yang sudah lama ada dalam masyarakat dan dilandasi kehausan politik, produksi kebohongan dan kekejaman terburuk itu dapat saja "diulangi; dengan cara dan bahan lama, kendati dengan kepentingan-kepentingan baru. Seperti adagium *'historia magistra vitae'*", bila pemerintah ingin agar generasi bangsa menjadi generasi yang sadar-kritis sekaligus punya jiwa toleransi, penguatan Peristiwa 1965 bukan hanya mencegah sejarah berulang, tapi juga penting bagi pendidikan bangsa, yang kritis, yang tidak mudah diadu-domba hanya dengan cerita bohong dan hasutan-hasutan yang membius nurani.

#### Menghimpun kemauan dan kemampuan

Antonius Sumarwan dalam karangan penutup, "Gagasan Tindak Lanjut", mendiagnosis bahwa kebuntuan upaya penyelesaian Peristiwa 1965 disebabkan oleh "salah fokus". Selama ini semua upaya diarahkan pada tujuan agar pemerintah bertindak dan menegakkan keadilan. Akan tetapi, faktanya pemerintah sendiri "terjerat" sehingga tidak dapat bertindak banyak. Fakta bahwa beberapa presiden telah menunjukkan niat mereka untuk menyelesaikan persoalan ini dan bahkan

semua dokumen telah disiapkan oleh Komnas HAM menunjukkan bahwa kecemasan itu bersumber pada kondisi politik yang tidak mendukung.

Presiden Jokowi saja pada April 2016 menyatakan, "Saya sadar [akan hal ini]", dan sebelumnya telah meminta aparat keamanan untuk berhenti mengintimidasi bahkan membantu upaya menemukan kuburan-kuburan massal. Namun daya Presiden pun terbatas bila mayoritas masyarakat tidak banyak bersuara menuntut hal ini sebagai prioritas sementara lingkungan istana mendesak respons yang sebaliknya. Pemerintah lantas akan memilih mengerjakan isu yang lebih "aman" dan dirasa lebih mendesak. Sumarwan sendiri mengajak agar para pejuang HAM turut memikirkan sebab-sebab dan variabel yang mengikat gerak pemerintah.

Tugas pengungkapan kebenaran lantas mesti melalui jalur penyadaran masyarakat. Faktanya, sebagaimana ditunjukkan oleh Vanessa Hearman bertolak dari studi kasus korban Operasi Trisula di Blitar Selatan, Jawa Timur, pada 1968, "status korban" para korban, para mantan tahanan politik, dan kelompok kiri belum dipahami dan diterima secara luas. Karya Katherine McGregor, "Membongkar Impunitas: Memori dan Aktivismé Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia dan Argentina" memberikan cerita yang amat menarik tentang upaya-upaya penyadaran yang dibuat di Argentina. Salah satunya ialah cara aktivis HIJOS (*Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio*) mengekspose para *represores* (penindas) yang terus hidup melenggang dalam masyarakat tanpa ada sanksi hukum. Mereka mendatangi lingkungan tempat tinggal para terduga pelaku, mendiskusikan masa lalu mereka dengan penduduk setempat, lantas dengan kolaborasi para seniman mengadakan tontonan (dinamai *escrache*) yang mengungkap kekejian yang telah dibuat para tersangka, sambil membawa foto-foto mereka yang telah tiada. Dengan cara itu mereka melucuti para pelaku dari anonimitas mereka.

Lebih lanjut Sumarwan menunjukkan bahwa upaya penyadaran tidaklah cukup dengan pendekatan-pendekatan rasional yang memberikan pengetahuan dan pemahaman. Perluah pendekatan-pendekatan yang menggerakkan perasaan dan membangkitkan imajinasi orang. Buku ini sendiri, kendati memberikan pemahaman yang jelas dan sikap yang amat tegas, tidak cukup membangkitkan perasaan dan imajinasi. Cerpenn-cerpenn tentang Peristiwa 1965 dan film-film dokumenter Joshua

Oppenheimer dapat digunakan untuk pendekatan afektif tersebut.

"Lanskap Memori Peristiwa 1965 di Semarang" yang ditulis oleh Martijn Eickhoff, dan kawan-kawan memberikan inspirasi lain. Eickhoff menunjukkan bahwa memori tentang kekejaman Peristiwa 1965 tidak pernah hilang di tempat-tempat yang memang menyimpan jerit nyeri jiwa-jiwa yang disiksa. Orang-orang yang ingin mendengar dan melihat kebenaran dari Peristiwa 1965 sangat mungkin menemukannya dari lokasi-lokasi tersebut.

Pada bagian awal karangan Eickhoff itu dijelaskan secara singkat situasi sosial dan politik Indonesia pada tahun 1965. Gambaran ini penting untuk memahami latar belakang situasi masyarakat yang memungkinkan terjadinya Peristiwa 1965. Hal ini menambah kekayaan buku ini sebagai salah satu sumber terpercaya untuk upaya penyadaran masyarakat melalui pendekatan rasional. Sayangnya, penjelasan yang diberikan masih sangat minim. Kita tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan penting seperti, "Kalau PKI memang kuat sebagai salah satu partai di Indonesia, mengapa PKI seperti tidak memberi perlawanan apapun?" Sumber lain juga masih dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman tentang campur tangan internasional dalam tragedi besar ini, yang sejatinya amat menentukan keberhasilan pembantaian massal itu, serta minimnya desakan internasional bagi penyelesaian Peristiwa 1965, bahkan setelah 55 tahun peristiwa itu berlalu.

Akhirnya, apa arti 1965 pada masa kini? 1965 berarti tanggung jawab yang mesti tegas dituntut, kekejaman paling brutal yang mungkin "diulang", dan duka yang masih membebani. 1965 juga berarti tuntutan untuk terus mencari cara-cara baru membuat seluruh komponen bangsa "mau" dan "mampu" menyelesaikan warisan pembantaian massal. Untuk itu harapan harus tetap dijaga, seperti diungkapkan oleh Sumarwan pada akhir karangannya, "Betapa pun gelapnya situasi masa lalu dan masa sekarang, betapa pun bobrok dunia kita ini, asalkan api semangat terus menyala, malam yang paling gelap pun akan berakhir, matahari akan terbit dan korban dipulihkan" (hlm. 288). Buku ini tidak lain merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan menularkan harapan itu. ●

Albertus Erwin Susanto,  
alumnus STF Driyarkara, Jakarta.